



Judul : DPR Heran Anggaran Buat Nelayan Kok Cuma Secuil
Tanggal : Minggu, 26 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soroti Postur Belanja KKP Tahun 2022

DPR Heran Anggaran Buat Nelayan Kok Cuma Secuil

Komisi IV DPR prihatin dengan postur anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pasalnya, belanja pemerintah buat nelayan dan masyarakat pesisir ternyata cuma secuil alias sangat kecil, kontras dengan belanja operasional di KKP.

ANGGOTA Komisi IV DPR Suhardi Duka mencontohkan pengadaan kapal (buat nelayan) yang hanya Rp 37 miliar. "Bandingkan dengan pengadaan speedboat, Rp 119 miliar. Jadi kepentingan buat nelayannya di mana, pemberdayaan dan keberpihakannya buat nelayan di mana, anggarannya kecil," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Suhardi juga menyoroti anggaran KKP untuk membuat kawasan Shrimp Estate atau kawasan budi daya udang yang hanya terpusat di satu kawasan, tapi menghabiskan anggaran sampai Rp 1/4 triliun. Ini kontras dengan kegiatan budi daya saat ini yang banyak tersebar di daerah, tapi dengan luasan cukup luas.

"Modeling kawasan budi daya Rp 250 miliar, ini KKP ingin

jadi BUMN atau untuk siapa ini? Kepentingan siapa? Saya tidak melihat ada kepentingan nelayan di sini dengan menggunakan anggaran Rp 250 miliar," heran dia.

Suhardi kemudian membandingkan anggaran perbaikan irigasi rakyat seluas 3.500 hektare dengan alokasi Rp 19 miliar. Padahal, kehidupan nelayan saat ini cukup memprihatinkan sehingga harusnya setiap belanja KKP sedapat mungkin bisa langsung dirasakan masyarakat dan berdampak langsung ke ke sejahteraan para nelayan.

"Saya tidak melihat belanja langsung ke masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan. Saya mungkin sulit menerima rancangan ini. Kalau teman-teman menerima, silakan," tambah politisi asal

Sulawesi Barat ini.

Sementara Anggota Komisi IV, Johan Rosihan mengingatkan, Presiden Joko Widodo punya komitmen untuk membangun Poros Maritim Indonesia. Sayangnya, postur anggaran belanja di KKP sama sekali tidak menggambarkan rencana besar Jokowi untuk membangun potensi kelautan sebagai kekuatan dalam negeri.

"Celakanya lagi, anggaran kita sudah sedikit tapi ingin membangun sesuatu yang merusak," kata Johan.

Politisi PKS ini lalu meruntuhkan program merusak KKP untuk membangun Shrimp Estate dengan anggaran Rp 250 miliar. Kawasan budi daya ini tidak pernah dibicarakan di Komisi IV DPR. Makanya, dia kaget ketika dalam beberapa kali kunjungan kerjanya ke daerah pemilikannya, sudah mulai ramai diperbincangkan soal kawasan Shrimp Estate.

Dia juga menyoroti alokasi belanja di Direktorat Perikanan Tangkap Tahun 2022 yang cukup

besar mencapai Rp 792 miliar sementara serapan anggarannya di tahun ini saja sangat kecil.

Di satu sisi, direktorat ini juga belum mampu mengangkat daya saing kinerja di perikanan tangkap. Contohnya, impor ikan cakalang yang cukup besar di Semester I 2021 sebesar 2.300 ton, dengan nilai 3,65 juta ton.

Johan juga menyayangkan kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang memiliki anggaran besar, memiliki alat canggih mendekripsi kapal pencuri ikan yang masuk ke Indonesia. Alat canggih itu bisa membedakan kapal yang ada suratnya dan yang tidak.

"Begini canggihnya. Tapi perlu kita tahu ada orang yang mencuri tapi kita tidak mempunyai kemampuan menangkap pencuri itu. Sayang punya alat mahal, bisa deteksi pencurinya tapi tidak punya kemampuan menangkap pencurinya," tambah dia.

Sementara Menteri Kelautan

Perikan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sebanyak 247.803 hektare tambak udang tradisional milik para nelayan produktivitasnya masih sangat rendah, 0,6 ton per hektare. Pada praktiknya, budi daya udang bisa mencapai 40 ton per hektare. Diperlukan upaya luar biasa luar biasa untuk mendongkrak produktivitas tambak-tambak tersebut.

"Memang idealnya pemerintah hadir di situ, memperbaiki infrastruktur yang ada. Minimal kalau diperbaiki bisa meningkat, tidak usah sampai 40 ton, mencapai 2 ton per hektare itu sudah cukup," katanya.

Jika pemerintah mampu mendongkrak produktivitas budi daya udang 2 ton per hektare, sambung dia, maka produktivitas udang nasional bisa naik mencapai 500 ribu ton setiap tahunnya.

"Kalau saya hitung, itu membutuhkan biaya dan angka yang sangat besar, tidak kurang dari Rp 53 triliun yang harus di-inject untuk memperbaiki seluruh tambak tersebut," katanya. ■ KAL